

<input type="radio"/> Senin	<input type="radio"/> Selasa	<input type="radio"/> Rabu	<input type="radio"/> Kamis	<input checked="" type="radio"/> Jumat	<input type="radio"/> Sabtu	<input type="radio"/> Minggu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<input type="radio"/> Jan	<input type="radio"/> Feb	<input type="radio"/> Mar	<input type="radio"/> Apr	<input type="radio"/> Mei	<input type="radio"/> Jun	<input type="radio"/> Jul	<input type="radio"/> Ags	<input type="radio"/> Sep	<input checked="" type="radio"/> Okt	<input type="radio"/> Nov	<input type="radio"/> Des				

Untuk "Venue" PON, Pemprov Bisa Gaet Perguruan Tinggi

BANDUNG, (PR).-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyarankan Pemprov Jabar mengadopsi cara yang dilakukan Pemprov Riau dalam penyediaan sarana dan prasarana. Dalam PON XVIII, Pemprov Riau melibatkan kampus dan perusahaan swasta, khususnya soal lahan.

"Di Pekanbaru, beberapa venue ada di kampus. Seperti venue bola voli di kampus Universitas Islam Riau dan stadion utamanya di lahan milik Universitas Negeri Riau. Nah, di Jabar kan ada ITB, Unpad, UPI, UIN, IPDN, UI, IPB, dan lainnya, termasuk perguruan tinggi swasta dan perusahaan. Itu kan bisa diberdayakan," kata Ketua Komisi E DPRD Prov. Jabar Didin Supriadin kepada wartawan, Kamis (4/10) di Gedung DPRD Prov. Jabar, Jln. Diponegoro, Kota Bandung.

Mengenai aturannya, Didin mengatakan, bisa dibicarakan dan dibahas sejak awal agar

tidak melanggar mekanisme. "Termasuk soal pendanaannya. Apakah diberikan langsung kepada kampus atau perusahaan itu. Atau pemerintah yang membangun dengan meminjam lahan kampus atau perusahaan. Soal kesepakatannya, bisa dibahas bersama," katanya.

Dia menuturkan, jika pemprov mengandalkan mekanisme dengan cara pembebasan lahan lalu membangun, akan menyedot waktu dan biaya. "Waktu efektif sekitar 2 hingga

3 tahun. Apalagi, sampai saat ini, Disorda belum punya data tentang kondisi riil sarana prasana yang ada," ujarnya.

Sinergi

Lebih lanjut Didin menuturkan, antara Disorda Jabar dan KONI Jabar harus sinergi serta bekerja sesuai tupoksinya masing-masing. "KONI fokus saja di pembinaan atlet agar cita-cita Jabar Kahiji bisa tercapai di PON XIX nanti. Tidak perlu terjun dalam infrastruktur. Itu tanggung jawab pemer-

intah. Kalau KONI mau memberi masukan bagaimana venue yang representatif, itu tidak apa-apa," ucapnya.

Menurut Didin, jika dilihat secara keseluruhan, saat ini Pemprov Jabar belum siap menggelar PON. "Jangankan anggaran, peta kondisi venue Disorda belum punya. Ironis kan ketika voli putri menang di PON kemarin dan tim renang berprestasi gemilang, sarana di sini tidak ada yang representatif," katanya. (A-128)***